

**2.5. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA  
142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI)**

**2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota  
DPRD Provinsi**

**2.5.1.1. Keterangan atas Pokok Permohonan bagian A  
Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara  
Pada Halaman 7 angka 2 terkait perolehan  
suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku  
Utara DAPIL IV Daerah Pemilihan Halmahera  
Selatan Sebagai Berikut;**

**ASLI**

a. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Selatan, tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat perbedaan dengan yang didalilkan oleh Pemohon (PKPI), sehingga oleh Pemohon (PKPI) mendalilkan terdapat pemilih siluman.

b. Bahwa terkait dalil pokok permohonan pemohon (PKPI) pada halaman 16 sampai dengan halaman 21 untuk data pemilih DPRD Kabupaten di Empat daerah pemilihan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Selatan dalam hal ini menyampaikan bahwa:

- 1) Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daerah pemilihan II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.2.
- 2) Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh

DITERIMA DARI BAWASLU  
NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
HARI : Jumat  
TANGGAL : 5 Juli 2019  
JAM : 16.42 WIB

- 2) Surat bernomor : TU.00/68/TTE/2018 tertanggal 03 Desember 2018 kepada KPU Kota Ternate perihal Sinergi Penyempurnaan DPTHP-II.
- 3) Surat bernomor : TU.00/28/TTE/2019 tertanggal 14 Maret 2019 kepada Pimpinan Parpol se-Kota Ternate Kota Ternate perihal Sinergi Penyempurnaan DPTb.
- c) Demi menjamin keakuratan potensi data DPK yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate, Bawaslu Kota Ternate juga telah melayangkan surat kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ternate sebagaimana surat bernomor : TU.00/27/TTE/2019 tertanggal 14 Maret 2019 perihal Permintaan Data Progres Perekaman E-KTP.
- d) Bahwa demi menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh Bawaslu Kota Ternate bernomor : TU.00/27/TTE/2019, Bawaslu Kota Ternate melakukan koordinasi langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kota Ternate. Koordinasi dimaksud juga melibatkan salah seorang komisioner KPU Kota Ternate a.n. Soleman Patras. Adapun fokus koordinasi menyangkut identifikasi data potensi DPK yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate sebanyak 648 pemilih. Melalui pendeteksian dokumen penduduk yang terdaftar pada dokumen data Dinas Dukcapil, ditemukan angka DPK yang memenuhi syarat sebanyak 509 pemilih. Berdasarkan hasil koordinasi dimaksud, Bawaslu Kota Ternate akhirnya melayangkan surat kepada KPU Kota Ternate dengan nomor : TU.00/32/TTE/2019 tertanggal 1 April 2019 perihal penyampaian rekomendasi pemilih DPK menjadi DPT.

pemohon (PKPI) pada daeha pemilihan III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.3.

- 3) Bahwa Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daeha pemilihan IV DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.4.
- 4) Bahwa Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daeha pemilihan V DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.5.
- 5) Bahwa oleh karena itu terdapat selisih data perolehan antara pemohon dengan data hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan;
- 6) Bahwa perbedaan data tersebut terdapat pada data DPT, DPTB dan DPK yang didalilkan oleh pemohon (PKPI) dengan data hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan sesuai yang terdapat pada formulir C1 dan DA1;
- 7) Berdasarkan dalil tersebut diatas Bawaslu Provinsi Maluku Utara Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Menjelaskan sebagai berikut :
  - a) Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pengumutan suara sampai pada

tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak mendapat laporan atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang dan sesuai dengan dokumen C1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan dengan yang disangkakan oleh pemohon (PKPI).

Tabel 1.1. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD Provinsi

Provinsi

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGUNTA HAK PILIH				PENGUNTA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK		DPT	DPTB	DPK	
1	Sebelei	1	251	0	0	0	251	0	0	0	251
2	Kida	1	113	1	0	0	113	0	0	0	113
3	Gafi	1	175	0	0	0	175	0	0	0	175
4	Dorolamo	1	124	0	0	0	120	0	0	0	120
5	Gurua	3	170	0	0	0	170	0	0	0	170
6	Rabut										
6	Daiyo	1	235	0	0	0	234	0	0	0	234
7	Kiowor	1	147	0	0	0	147	0	0	0	147
		1	173	0	0	0	171	0	0	0	171
		2	179	3	0	0	179	3	0	0	182
	Dauri	3	160	0	0	0	158	0	0	0	158
8		4	165	0	0	0	165	0	0	0	165
9	Ake Jailolo	1	270	1	0	0	163	1	0	0	164
10	Ngoko	1	149	2	2	2	118	0	2	2	120

11	Malako	1	226	5	0	231	226	226	5	0	231
		2	69	0	5	74	73	69	0	5	74
		3	12	0	13	25	27	15	0	13	28
12	Tunggul	3	97	9	0	106	104	97	9	0	106
		1	242	0	0	242	242	247	0	0	247
13	Oci Maloleo	2	247	0	0	247	248	247	0	0	247
		1	234	0	0	234	237	234	0	0	234
14	Fluk	2	220	0	0	220	220	220	0	0	220
		3	236	0	0	236	238	236	0	0	236
		1	152	0	0	152	216	145	10	0	155
15	Kawasi	2	151	0	0	151	211	138	13	0	151
		3	137	0	0	137	208	134	9	0	143
		2	188	3	0	191	188	188	3	0	191
16	Wooi	5	189	10	0	199	195	189	10	0	199
		6	167	0	1	168	167	167	0	1	168
17	Sosepe	1	141	0	0	141	141	141	0	0	141
		1	171	0	0	171	171	171	0	0	171
18	Tabapoma	2	184	0	0	184	184	184	0	0	184

19	Wayatim	1	137	134	0	0	134	137	134	0	0	134
		2	143	142	0	0	142	143	142	0	0	142
20	Tabalema	2	214	214	0	0	214	214	214	0	0	214
<b>Jumlah Total</b>				<b>5713</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>5768</b>	<b>6098</b>	<b>5698</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>5782</b>

2.5.1.2 Keterangan atas Pokok Permohonan Bagian A Halaman 8 angka 3 terkait perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Daerah Pemilihan Halmahera Selatan Pemohon mendailikan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan Sebagai Berikut;

Tabel 1.2. Perbandingan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD

Kabupaten Daerah Pemilihan II :

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGUNA HAK PILIH				PENGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK		DPT	DPTB	DPK	
1	Sebelei	1	251	0	0	0	251	0	0	0	251
2	Kida	1	113	113	1	0	113	0	0	0	113
3	Gafi	1	175	171	0	0	171	0	0	0	171
4	Dorolamo	1	124	120	0	0	120	0	0	0	120
5	Gurua	3	170	170	0	0	170	0	0	0	170
6	Rabut Daiyo	1	235	234	0	0	234	0	0	0	234
7	Kiowor	1	147	147	0	0	147	0	0	0	147
8	Dauri	1	173	171	0	0	171	0	0	0	171
		2	179	179	3	0	0	179	3	0	0



		3	160	158	0	0	158	160	158	0	0	158
		4	165	165	0	0	165	165	165	0	0	165
9	Ake Jailolo	1	270	163	1	0	164	270	163	1	0	164
10	Ngoko Malako	1	149	118	2	2	122	149	118	0	2	120
<b>Jumlah Total</b>			<b>2311</b>	<b>2160</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2169</b>	<b>2308</b>	<b>2160</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2166</b>

Tabel 1.3. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan III:

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGUNA HAK PILIH				PENGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK		DPT	DPTB	DPK	
1	Gonone	1		249	0	0	249	249	0	0	249
2	Pasipalele	2		195	0	0	195	190	0	5	195
3	Sumber Makmur	1	226	226	5	0	231	226	5	0	231
		2	73	69	0	5	74	73	0	5	74
		3	27	12	0	13	25	27	0	13	28
4	Tunggul Wulung	3	104	97	9	0	106	104	9	0	106
<b>Jumlah Total</b>				<b>848</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>880</b>	<b>920</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>883</b>

Tabel 1.4. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan IV

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JLH	JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				DPT	DPTB	DPK			DPT	DPTB	DPK	
1	Oci Maloleo	1	242	0	0	242	242	247	0	0	247	
		2	248	0	0	247	248	247	0	0	247	
2	Fluk	1	237	0	0	234	237	234	0	0	234	
		2	220	0	0	220	220	220	0	0	220	
3	Loleo	3	238	0	0	236	238	236	0	0	236	
		1	167	0	0	167	260	167	0	0	167	
4	Wooi	2	188	3	0	188	188	188	3	0	191	
		5	189	10	0	189	195	189	10	0	199	
5	Sosepe	6	167	0	1	167	167	167	0	1	168	
		1	141	0	1	141	141	141	0	0	141	
6	Madopolo	1	167	0	0	167	231	130	0	37	167	

7	Kawasi	1	152	0	0	152	216	145	10	0	155
		2	151	0	0	151	211	138	13	0	151
		3	137	0	0	137	208	134	9	0	143
8	Laiwui	5	154	0	0	129	201	142	0	12	154
9	Anggai	4	130	0	0	122	232	126	0	4	130
10	Sambiki	5	160	0	0	160	204	156	1	4	161
11	Jikotamo	1	127	0	0	127	215	116	0	11	127
<b>Jumlah Total</b>			<b>3209</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3190</b>	<b>3854</b>	<b>3123</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>3238</b>

Tabel 1.5. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan V

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGUNA HAK PILIH				PENGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK		DPT	DPTB	DPK	
1	Tabapoma	1	171	171	0	0	171	171	0	0	171
		2	184	184	0	0	184	184	0	0	184
2	Wayatim	1	137	134	0	0	137	134	0	0	134
		2	143	142	0	0	143	142	0	0	142

3	Tabalema	2	214	214	0	0	214	214	214	0	0	214
<b>Jumlah Total</b>			<b>849</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>849</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>

Bahwa Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Selatan dan Jaringan Pengawas pada hari pemungutan suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak mendapat laporan dan /atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di TPS 1 Desa Sebelei dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;

**2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten**

**2.5.1.1. Kabupaten Halmahera Selatan**

**(Dalil Permohonan memiliki substansi yang sama dengan permohonan terhadap pemilihan anggota DPRD Provinsi)**

**2.5.1.2. Kabupaten Sula**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 25 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan. **(PK.33.6-1)**
- b. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat sehingga panwaslu kecamatan sulabesi barat berpendapat melakukan pencocokan salinan formulir C1.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno PPK Sulabesi

Barat terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat dan meminta kepada Panwas Kecamatan Sulabesi Barat untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di kecamatan sulabesi barat.

- d. Bahwa terhadap keberatan saksi tentang perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Sulabesi Barat maka panwas kecamatan berpendapat bahwa terhadap keberatan saksi maka di lakukan pencocokan terhadap salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik.
- e. Bahwa terhadap pandangan yang di sampaikan oleh panwas kecamatan sulabesi barat tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 namun saksi partai politik yang mengajukan keberatan walk out dari ruang pleno hingga pleno rekapitulasi selesai saksi yang mengajukan keberatan tidak menghadiri pleno rekapitulasi PPK sulabesi barat dan hanya dua saksi partai yang mengikuti proses pleno rekapitulasi PPK hingga selesai dan menandatangani dokumen DA1 yakni saksi partai Demokrat dan saksi partai PKS.
- f. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- g. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula .

Tabel 1  
Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Barat

<b>PARTAI PKPI</b>					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	16	3	25
2	Suhidir Tabaika	II	5		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	0		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	0		
7	Aisia Sanaba	II	1		

2. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 26 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
3. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Procinsi di TPS 01 Waigay.
4. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay

sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 01 Waigay.

5. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Procinsi di TPS 03 Waigay.
6. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Waigay.

Tabel 2

Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Selatan

<b>PARTAI PKPI</b>					
<b>No</b>	<b>Nama Caleg</b>	<b>Dapil</b>	<b>Suara Caleg</b>	<b>Suara Partai</b>	<b>Jumlah</b>
1	Syafi Naipon	II	2	2	8
2	Suhidir Tabaika	II	0		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	3		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	1		
7	Aisia Sanaba	II	0		



- g. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- h. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
- i. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Timur yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 25 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
- j. Bhwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Wailia.
- k. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan 02 Desa Fatkauyon.
- l. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK

Sulawesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulawesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 02 Desa Sama.

- m. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulawesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulawesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulawesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Baleha.
- n. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulawesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulawesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Waigoiyofa.

Tabel 3  
Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Timur

<b>PARTAI PKPI</b>					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	0	0	59
2	Suhidir Tabaika	II	3		
3	Fani duwila, SE	II	1		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	0		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	54		
7	Aisia Sanaba	II	1		

- c. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- d. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula .
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sesuai hasil pengawasan Panwas Kecamatan terhadap rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Tengah yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 24 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
- f. Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi pada rekapitulasi PPK kecamatan sulabesi Tengah maka panwaslu kecamatan sulabesi tengah berpandangan melakukan pencocokan formulir C1 palano dengan salinan C1 Hologram.

Tabel 4  
Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Tengah

<b>PARTAI PKPI</b>					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	0	2	59
2	Suhidir Tabaika	II	56		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	1		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	0		
7	Aisia Sanaba	II	0		

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula .
- c. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana Utara terhadap rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana Utara yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 24 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
- d. Bahwa berdasar pada hasil pengawasan panwaslu kecamatan sanana utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana, panwas kecamatan sanana utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di TPS 01 Desa Pohea.
- e. Bahwa berdasar pada hasil pengawasan panwaslu kecamatan sanana utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana, panwas kecamatan sanana utara

mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Bajo.

Tabel 5

Perolehan Suara Kecamatan Sanana Utara

PARTAI PKPI					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	1	1	3
2	Suhidir Tabaika	II	0		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	0		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	0		
7	Aisia Sanaba	II	1		

- f. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- g. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- h. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 2 dapat kami jelaskan tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan pada pleno berjenjang.
- i. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 2 dapat kami jelaskan tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- j. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 3 dapat kami jelaskan tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan pada pleno berjenjang.
- k. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 3 dapat kami jelaskan tidak ada laporan atau temuan

yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

- l. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1.Dapil 2 angka 4 sesuai hasil pengawasan bawaslu pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula dapat kami jelaskan.
- m. Bahwa berdasarkan pada pengawasan Bawaslu pada saat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saksi partai politik PPP mengajukan keberatan di kecamatan sulabesi barat maka Bawaslu Mengeluarkan rekomendasi pencocokan dan perolehan suara pemilu 2019 TPS 01 dan TPS 02 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat.
- n. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan TPS 002 Wailia kecamatan sulabesi timur sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019.
- o. Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula di kecamatan sulabesi tengah maka Bawaslu berpendata bahwa melakukan pencocokan DA1 dengan DAA1.
- p. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik tentang selisih data perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara

- pemilu 2019, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan C1 DPRD Kabupaten di kecamatan mangoli barat.
- q. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan DA1 DPRD Kabupaten di kecamatan mangoli barat.
  - r. Bahwa atas dasar keberatan saksi yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula di kecamatan mangoli selatan maka bawaslu kabupaten kepulauan sula berpendapat bahwa melakukan pencocokan formulir DAA1 Palano dengan sertifikat formulir DA1.
  - s. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1.Dapil 2 angka 5 dapat kami jelaskan.
  - t. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon. **(PK.33.6-12)**
  - u. Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.
  - v. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : 03/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.

- w. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor saudara Edy Rustam Abdul Gani Koroy telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Ka bupaten Kepulauan Sula.
- x. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan.
- y. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon.
- z. Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat.
- aa. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 02, Ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa Waiina telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- bb. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : 10/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- cc. Bahwa berdasarkan pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan. (dokumen penanganan pelanggaran)
- dd.



ee. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1. Dapil 2 angka 5 dapat kami jelaskan.

- 1) Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon.
- 2) Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.
- 3) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : 03/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- 4) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor saudara Edy Rustam Abdul Gani Koroy telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan.
- 6) Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon.
- 7) Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus

delikti/tempat kejadian di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat.

- 8) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 02, Ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa Waiina telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 9) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : 10/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- 10) Bahwa berdasarkan pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan.
- 11) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 4 angka 1 dapat kami jelaskan.
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Mangoli Barat berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi sanding dan perbaikan pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano.

Tabel 4

PARTAI PKPI					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Adinan Sangaji	IV	1	1	54
2	Hadi Umaternate	IV	1		
3	Nurida Abdul Wahid	IV	1		
4	H. M. Darman Abdullah	IV	49		
5	Nurhayati Umasangaji	IV	1		

Perolehan Suara Kecamatan Mangoli Barat

- 13) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 4 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- 14) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 4 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula .
- 15) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Utara yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 27 April 2019 dapat kami jelaskan.
- 16) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang di TPS 12 Falabisahaya.